

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrianto, Nico. *Good e-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ilyas, Wirawan B., and Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adirya Bakti, 2004.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Litera Yogyakarta*, 2014.
- N.D, Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. ANDI Yogyakarta, 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Salamun. *Prospek Dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 1991.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Soemitro, Rochmat. *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendra, Adi, et al. *Ekstensifikasi Dan optimalisasi Peningkatan PAD*. Jakarta: Bina Praja Press, 2021
- Sumitro, Ronny Hanintyo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sumyar. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*. ANDI Yogyakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- . *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syagrani, & Syahrani. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, EDISI Cetakan Ke 1*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

B. Artikel Jurnal

- Anggraini, Mellisa. “Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara”. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 15 (3):627-38. 2024
- Dwangu, A. M., & Mahlangu, V. P. Accountability In The Financial Management Practices Of School Principals. *International Journal Of Educational Management*, Vol. 35, No. 7, 2021.
- Koppell, Jonathan G.S. “Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of ‘Multiple Accountabilities Disorder.’” *Public Administration Review*. Vol. 65, No. 1. 2005.
- Nurhayati, Neni. “Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah III Cirebon.” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 1, no. 01: 49–61. 2015
- Rachmawati, Tutik, & Kusuma Dwi Fitriyanti. “Analysis of the E-Government Initiative at Local Government Level in Bandung City, Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 25, No. 1, 2021.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, dan Royke Bahagia Rizka. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan*

Akuntansi : EMBA 2, No. 1, 137–56. 2023

Sjursen, Ingrid Hoem. “Accountability and Taxation: Experimental Evidence.”
Journal of Economic Behavior and Organization 216, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Restoran

Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/Akuntabilitas>, diakses 9 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PATUH>, diakses 8 Juli 2024.

Pranyoto, Victorianus Sat, “Sleman Memberlakukan Pembayaran Pajak Online,” <https://Jogja.Antaraneews.Com/Berita/349082/Sleman-Memberlakukan-Pembayaran-Pajak-Online>, diakses 2 Juli 2024.

TEMPO, “Pariwisata Sumbang PAD Sleman Rp283,53 Miliar, Terbesar dari Pajak Hotel dan Restoran”, <https://www.tempo.co/hiburan/pariwisata-sumbang-pad-sleman-rp283-53-miliar-terbesar-dari-pajak-hotel-dan-restoran-405363>, diakses 10 November 2024.